BAB III
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,bahwa penulis melaksanakan kerja praktek di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten Majalengka. Penulis ditempatkan di bagian Pendapatan. Pelaksanaan kerja praktek dimaksudkan untuk mengetahui prosedur penyusunan rencana strategic pemasaran dan pembangunan daerah.

Selama melaksanakan kerja praktek penulis mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai tata tertib yang telah diterapkan dan penjelasan mengenai tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Penulis juga banyak dibimbing dan diberi masukan tentang bagaimana aktivitas dan perkembangan dan DPKAD kabupaten Majalengka. Dalam membuat laporan ini,penulis lebih menekankan kepada penyusunan rencana strategic pemasaran dan pembangunan daerah tahun 2010-2015 pada DPKAD kabupaten Majalengka.

3.1.1 Rencana Strategik

3.1.1.1 Pengertian Rencana Strategik

Menyadari pentingnya rencana strategic bagi suatu organisasi, maka disarankan agar orang-orang yang terlibat dalam prosesnya meliputi, pimpinan organisasi/institusi di semua tingkat/level, tenaga profesional, staf administrasi, termasuk mitra eksternal atau para pemangku kepentingan (*stakholders*) bersama-sama dalam memikirkan arah dan mengindentifikasi prioritas isu-isu atau masalah

yang akan diselesaikan. Dengan kata lain pengembangan visi,misi,tujuan (*objective*) dan sasaran (*goal*) yang akan dicapai merupakan penyusunan bersama dari semua orang yang terlibat dalam perencanaan strategik.

Perencanaan strategic dikenal juga sebagai perencanaan jangka panjang karena mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan memberikan perusahaan posisi yang paling menguntungkan dalam lingkungannya, serta menentukan strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

3.1.1.2 Jenis Perencanaan

Dalam setiap Organisasi rencana disusun secara hierarki sejalan dengan struktur organisasinya. Pada setiap jenjang,rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang dibawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya.

Ada dua jenis rencana,, diantaranya yaitu :

1. **Rencana Strategik** yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi,yaitu melaksanakan misi organisasi
2. **Rencana Oprasional** yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik dilaksanakan. Rencana Oprasional terdiri atas beberapa bentuk, yaitu

3.1.1.3 Prinsip Penyusunan Rencana Strategik

Sejalan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah No25/2004,maka penyusunan rencana strategik SKPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Teknokratis (Strategik)

Dokumen renstra SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategik. Kualitas dokumen rencana strategik SKPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh rencana strategik SKPD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategik.

2. Demokratis dan Partisipatif

Ini bermakna bahwa proses penyusunan rencana strategik SKPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat *(stakeholder)* dalam mengambil keputusan perencanaan di semua tahap perencanaan.

3. Politis

Ini bermakna bahwa penyusunan rencana strategik SKPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD.

4. *Bottom-Up*

Ini bermakna bahwa proses penyusunan rencana strategik SKPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

5. *Top-Down*

Ini bermakna bahwa proses penyusunan renstra SKPD perlu bersinergi dengan rencana strategik di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan.

3.1.1.4 Langkah-Langkah Dalam Perencanaan

Secara garis besar terdapat empat langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang organisasi. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

A. Menetapkan Sasaran

Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber agar lebih efektif.

B. Merumuskan Posisi Organisasi Pada Saat Ini

Jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui dimana saat ini organisasi berada dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Rencana baru dapat disusun jika organisasi telah mengetahui posisinya pada saat ini. Untuk ini di dalam organisasi harus terdapat suasana keterbukaan agar informasi mengalir dengan lancar terutama data keuangan dan statistik.

C. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Menuju Sasaran

Selanjutnya perlu diketahui faktor faktor, baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang terlah ditetapkan. Diakui jauh lebih mudah mengetahui apa yang akan terjadi pada saat ini, dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. betapa pun sulitnya melihat ke depan adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan.

D. Menyusun Langkah-Langkah Untuk Mencapai Sasaran

Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif-alternatif ini, dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan oleh penulis selama 1 bulan yaitu mulai terhitung sejak tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011. Penulis melaksanakan kegiatan setiap harinya dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB dan ditempatkan pada bidang pendapatan.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktek adalah sebagai berikut :

1. Perkenalan dengan pembimbing kerja praktek dan beberapa staff karyawan yang ada di bagian kepegawaian.
2. Penulis mendapatkan penjelasan tentang kepegawaian.
3. Pengarahan dan bimbingan dari pembimbing pada instansi tersebut.
4. Membantu tugas-tugas yang dikerjakan di bagian kepegawaian.
5. Menginput data.

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan akhir ini maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. **Observasi**

   Penulis mengamati dan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan secara langsung yang dilakukan ditempat kerja praktek pada bagian pendapatan.

2. **Wawancara**

   Penulis melakukan wawancara dengan pembimbing dan pegawai lain di bagian pendapatan. hal ini penulis lakukan supaya data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan akhir kerja praktek menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan harapan yang diinginkan penulis.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan di DPKAD Kabupaten Majalengka, maka penulis akan membahas beberapa kajian sebagai berikut :

3.3.1 Penyusunan Rencana Strategik Pemasaran dan Pembangunan Daerah Tahun 2010 - 2015 pada DPKAD Kabupaten Majalengka

Menurut Undang-Undang Daerah nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, strategik adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rencana strategik (Renstra) adalah rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan instansi pelaksana. Rencana strategis diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun rencana strategik disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi masalah dan tantangan pembangunan dan lain-lainya, khususnya dalam aspek sosial ekonomi.

b. Merumuskan visi, misi dan strategik analisis sosial ekonomi dan kebijakan makro ekonomi yang tanggap atas dinamika lingkungan strategic pembangunan.

c. Menyusun prioritas program analisis yang sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

d. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya unit kerja.

Sementara itu, kegunaan rencana strategik adalah sebagai berikut :

a. Menjamin konsistensi perumusan tujuan, program dan kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan makro sesuai visi/misi kabupaten/kota.

b. Sebagai acuan dalam perumusan rencana operasional program analisis dan mobilisasi sumber daya.

c. Sebagai media untuk mengkomunikasikan tujuan, visi, program dan kebutuhan sumber daya dengan mitra kerja (*stakeholders*). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat rencana strategik.

Berdasarkan penjelasan umum Undang -Undang Daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga instansi pemerintah.
2. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
3. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Langkah Penyusunan Rencana Strategis secara berurutan dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratis, menyeluruh, dan terukur.
2. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

3. Pelibatan masyarakat (*stakeholders*) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

3.3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal Serta Peluang dan Tantangan DPKAD dalam Penyusunan Rencana Strategik Pemasaran dan Pembangunan Daerah

3.3.2.1 Kelemahan dan Kekuatan Internal DPKAD

Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan yang terformulasikan dalam rencana strategic pemasaran dan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka dari tahun 2010-1015 perlu memperhatikan kelamahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian 5 (lima) tahun kebelakang dari tahun 2005-2010.

Kelemahan dan Kekuatan Internal DPKAD dalam Penyusunan Rencana Strategik Pemasaran dan Pembangunan Daerah.

1.Tidak ada peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah. tersedianya Perda, Perwal dan Keputusan Walikota tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.*Reward* dan *Punishment* belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja. pengalaman empirik dari SDM dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

3.Lambatnya penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat terhadap cepatnya pelayanan. tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

4.Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolan keuangan dan asset daerah. kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.

5.Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan. sikap tenggang rasa dari sesame aparat cukup tinggi.

3.3.2.2 Peluang dan Tantangan Ekternal DPKAD

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategik pembangunan daerah Kabupaten Majalengka untuk tahun 2010-2015, yaitu :

Peluang dan Tantangan Eksternal DPKAD dalam Penyusunan Rencana Strategik Pemasaran dan Pembangunan Daerah

1.Laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2005-2010 menunjukan angka positif fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro.

2.Potensi wajib pajak dan retribusi mengalami tren kenaikan yang positif dalam *tax effort* ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi.

3.Pusat kegiatan wilayah menjadi daya magnet terhadap hak dan kewajiban daerah kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya.

4.Kemauan politik anggota DPRD Dapil Kabupaten Majalengka memperjuangkan anggaran dari pusat dan propinsi perubahan aturan yang cepat mendorong penata usaha keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

5.Minat yang tinggi untuk melakukan studi banding ke kota dan daerah luar pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan.